

MASYAKAT TRANSPORTASI INDONESIA KILASAN SEJARAH

Kilas balik

Transportasi merupakan salah satu pilar utama pendukung percepatan pembangunan nasional. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan kepulauan yang tersebar di sepanjang garis katulistiwa membuat kelancaran mobilitas barang, jasa, dan manusia merupakan suatu kebutuhan mutlak yang hanya dapat diwujudkan melalui jasa transportasi. Jadi, transportasi memegang peran amat sentral dalam kelancaran arus barang maupun mobilitas manusia. Kecuali itu, transportasi juga menjadi bagian integral dalam upaya besar menjalin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mengintensifkan interaksi budaya antar anak bangsa, membangun kohesi sosial, meningkatkan daya guna sumber daya nasional, serta berperan aktif dalam mewujudkan (pemerataan) kesejahteraan nasional.

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya transportasi sebagai salah satu pendukung utama keberhasilan pembangunan nasional itulah gagasan tentang pembentukan sebuah organisasi profesi di bidang transportasi muncul ke permukaan. Melalui organisasi profesi tersebut diharapkan akan muncul gagasan-gagasan kreatif untuk pengembangan transportasi di Indonesia dan sekaligus menjadi ruang publik yang dapat menampung berbagai permasalahan maupun gagasan untuk pengembangan transportasi itu sendiri.

Gagasan pendirian organisasi tersebut sebetulnya sudah mulai muncul pada awal dekade 1980-an. Beberapa orang dari kalangan pemerintah (Departemen Perhubungan), kalangan akademisi (UI dan ITB), serta kalangan BUMN (Perumka dan PT Garuda) bertemu untuk membicarakan rencana pembentukan organisasi profesi di bidang transportasi. Tapi beberapa kendala menyurutkan pembentukan organisasi ini, sehingga gagasan tersebut tinggal gagasan yang belum dapat terealisasikan.

Pada era 1990-an gagasan ini mencuat kembali, bahkan sudah mengerucut pada usulan nama yakni, Himpunan Masyarakat Transportasi Indonesia. Tapi ide ini pun surut oleh sang waktu. Baru pada September 1994, gagasan pembentukan organisasi ini muncul kembali ke permukaan dengan energi baru. Ada banyak faktor yang mendorong tumbuhnya semangat baru tersebut. Salah satunya, menurut Ir. Alvinsyah, MSc (dosen UI) adalah faktor Jepang yang ingin mengembangkan masyarakat transportasi di kawasan Asia. Alvin ragu, kalau tidak ada faktor Jepang mungkin belum dimulai pembentukannya.

Harapannya ada sekretariat tetap. Tapi masalahnya adalah siapa yang membiayai sekretariat tersebut? Harapannya adalah dari kegiatan-kegiatan tersebut yang menghasilkan uang.

Beberapa lembaga pemerintah seperti Departemen Perhubungan, BPPT, dan BAPPENAS, serta unsur perguruan tinggi (UI & ITB), unsur BUMN dan swasta (PT Garuda, Sempati) mencoba mengkonkretkan gagasan tersebut dengan membentuk sebuah tim yang beranggotakan 13 orang. Tim ini kemudian disebut sebagai Tim Tiga Belas yang terdiri dari perwakilan dari pemerintah, perguruan tinggi dan BUMN/swasta.

Tim ini secara rutin mengadakan pertemuan mingguan untuk mempersiapkan pertemuan pleno guna melontarkan ide pembentukan organisasi profesi di bidang transportasi di Indonesia. Kebetulan di saat yang sama muncul keinginan kuat dari beberapa negara di kawasan Asia untuk membentuk East Asia Transport Society yang merupakan kumpulan *transport society* dari tiap negara di Asia yang disponsori oleh Japan Transport Society (JTS). Di Indonesia sendiri nama yang diusulkan waktu itu adalah Indonesia Transport Society (Masyarakat Transportasi Indonesia/MTI).

Awal Mula

Pleno pertama yang diprakarsai oleh Tim Tiga Belas diselenggarakan di Gedung PT Garuda Indonesia Jakarta pada 04 April 1995. Pertemuan yang diketuai Bapak Muchtarudin Siregar (Sekjen Departemen Perhubungan) itu merumuskan pembentukan wadah organisasi profesi di bidang transportasi. Peserta pleno terdiri dari perwakilan dari Departemen Perhubungan, BPPT, BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Bappeda DKI Jakarta, UI, ITB, UGM, ITS, Unhas, serta unsur dari BUMN dan Swasta. Pleno pertama menghasilkan rumusan perlunya disempurnakan konsep dan bentuk organisasi profesi. Pleno juga menugaskan agar Tim Tiga Belas melaksanakan dan mempersiapkan rapat pleno kedua.

Pleno kedua juga diadakan di gedung yang sama pada tanggal 24 Mei 1995 dengan mengundang peserta yang sama dengan tambahan peserta dari perwakilan PT IPTN, PT PAL Surabaya, dan PT Jasa Marga. Pleno ini menghasilkan kesepakatan berupa pembentukan organisasi profesi di bidang transportasi yang deklarasinya ditandatangani oleh semua peserta. Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan pleno kedua dan persiapan pembentukan organisasi seperti AD/ART, struktur organisasi dll. peserta pleno sepakat untuk membentuk sebuah tim lagi menggantikan tim sebelumnya. Tim ini karena beranggotakan sebelas orang, maka dinamakan Tim Sebelas yang diketuai oleh Soebagijo Soemadhardjo dari Departemen Perhubungan.

Tabel 1. Anggota Tim Sebelas

No	Nama	Instansi
1	Drs. Soebagijo Soemadhardjo, SH	Dephub
2	Dr. Ir. Bambang Sugeng, S	Dephub

3	Drs. Komarudin MA	BPPT
4	Dr. Ir. Budhy Tjahjati	BAPPENAS
5	Dr. Ir. Agus Salim Ridwan	ITB
6	Ir. Ruslan Diwiryono	Dept PU
7	Ir. Budihardjo Suksmadi	BAPPEDA DKI
8	Prof. Ir. Pinardi Kussalam, MSc	ITS
9	Hasan M. Soedjono MBA	PT Sempati
10	Drs. Januar Batubara	LIPI
11	Ir. Alvinsyah MCE	UI

Tim Sebelas mengadakan pertemuan sebanyak dua kali bertempat di Gedung BPPT, Jakarta pada tanggal 2 dan 13 Juni 1995. Tim tersebut berhasil menyelesaikan rumusan berupa: nama organisasi yakni Masyarakat Transportasi Indonesia (disingkat menjadi MTI), draft AD/ART organisasi, struktur organisasi dan usulan anggotanya dan program kerja organisasi. Beberapa butir penting dari AD/ART organisasi yang berhasil dirumuskan Tim Sebelas adalah sebagai berikut:

Pelindung organisasi adalah Menteri Perhubungan dan pengurus pelaksana pusat terdiri dari:

1. Ketua umum.
2. Empat orang ketua.
3. Sekretraris jendral.
4. Dua orang sekretaris.
5. Bendahara umum.
6. Dua orang bendahara.
7. Delapan orang ketua bidang.

Ketentuan tentang keanggotaan organisasi ini adalah:

1. Pendiri otomatis menjadi anggota.
2. Setiap anggota baru harus direkomendasikan oleh minimal 3 anggota, dengan masa keanggotaan minimal setahun.
3. Disetujui adanya anggota perusahaan yang tidak mempunyai hak dipilih dan memilih.

Struktur kepengurusan organisasi ini adalah:

1. Pengurus terdiri dari: pengurus pusat, pengurus daerah dan pengurus cabang.
2. pengurus daerah ada di setiap ibukota propinsi dengan jumlah anggota minimal 17 orang.
3. Pengurus cabang dapat dibuka di setiap kabupaten atau universitas dengan jumlah anggota minimal 8 orang.
4. Anggota terdaftar atau berada pada pengurus daerah.

Ketentuan mengenai kongres adalah sebagai berikut:

1. Rapat pleno anggota pertama yang dinamakan kongres, akan mengesahkan organisasi, termasuk AD/ART dan struktur/personalia organisasi.

2. Kongres dipimpin oleh ketua umum pengurus pelaksana pusat atau dipilih dari anggota kongres.
3. Kongres pertama dihadiri oleh seluruh anggota pendiri dan undangan yang ditentukan panitia.
4. Kongres berikutnya akan dihadiri oleh pengurus daerah atau cabang yang telah dibentuk dengan jumlah suara tertentu.

Kemudian Tim Sebelas mengadakan rapat untuk yang ketiga kalinya bertempat di Gedung BPPT pada 17 November 1995 dan menghasilkan beberapa rumusan, yaitu:

1. Peresmian organisasi akan dilakukan bersamaan dengan diselenggarakannya simposium transportasi nasional.
2. Peresmian paling lambat dilakukan pada Desember 1995 bersamaan dengan ulang tahun emas kemerdekaan Republik Indonesia, yang akhirnya ditetapkan tanggal 21 Desember 1995.
3. Ketua Tim Sebelas akan segera melaporkan hasil kesepakatan terakhir secara resmi kepada Menteri Perhubungan dan Sekjen Departemen Perhubungan selaku pemberi mandat dan memohon kesediaan Menteri Perhubungan untuk memberikan pidato pengarah dan sekaligus membuka Symposium Transportasi Nasional.
4. Untuk mempersiapkan pelaksanaan simposium, dibentuklah tim pengarah dan panitia pelaksana (lihat lampiran 1).

Pada tanggal 21 Desember 1995, Symposium Transportasi Nasional diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Pleno Ketiga pembentukan organisasi profesi Masyarakat Transportasi Indonesia. Bertempat di Gedung PT Garuda Indonesia, symposium dihadiri 80 peserta dari 150 tamu undangan dengan mengambil tema, 'Transportasi Nasional yang Andal dalam Menyongsong Era Globalisasi.'

Rapat Pleno dipimpin oleh Bapak Muchtarudin Siregar didampingi Ruslan Diwiryono, Komarudin dan Soebagija Soemodihardjo. Rapat Pleno diawali dengan pembacaan laporan ketua Tim Sebelas Soebagijo Seomodihardjo tentang apa yang telah dilakukan oleh Tim Sebelas. Setelah itu, ketua sidang menawarkan kepada hadirin apakah setuju bahwa pada saat itu ditetapkan sebagai hari berdirinya organisasi profesi yang dinamakan Masyarakat Transportasi Indonesia. Secara aklamasi para hadirin menyetujuinya dan hal ini diperkuat dengan pernyataan tertulis dari masing-masing peserta. Jadi tanggal 21 Desember 1995 merupakan tanggal kelahiran MTI.

Ketua sidang kemudian menyatakan bahwa Rapat Pleno tersebut dianggap sebagai kongres pertama Masyarakat Transportasi Indonesia, dan peserta yang hadir akan ditetapkan sebagai anggota pendiri, menerima rancangan AD/ART yang telah dibagikan dan memilih formatur untuk menyusun pengurus pelaksana dan tugas-tugasnya.

Dengan masukan dari anggota Tim Sebelas, nama-nama formatur diusulkan ke kongres. Forum pun akhirnya menyepakati 7 anggota formatur, yaitu:

1. Dr. Ir. Suyono Dikun, MSc dari Bappenas.
2. Dr. Ir. Bambang Sugeng S. dari Dephub.

3. Ir . Suwardjoko Warpani MTCP dari Dephub.
4. Dr. Ir. Indrayati TM Subagio dari BPPT.
5. Drs. Darmawan Tas'an dari PT VTP.
6. Ir. Alvinsyah, MSE dari UI.

Dari ketujuh formatur tersebut, akhirnya secara aklamasi terpilih Dr. Ir. Suyono Dikun, MSc dari Bappenas sebagai Ketua Formatur Masyarakat Transportasi Indonesia. Adapun struktur Pengurus Pelaksana MTI periode 1995 - 1998 yang berhasil disusun tim formatur adalah sebagai berikut:

Ketua umum	: Dr. Suyono Dikun, MSc.
Ketua I	: Dr. Hermanto Dardak.
Ketua II	: Ir. Syahrizal, MSc.
Sekretaris umum	: Ir. Iskandar Abubakar, MSc.
Wakil Sekretaris	: Ir. Heru Deewanto, MSc
Bendahara Umum	: Dr. Bambang Sugeng
Bendahara I	: Ir. F. Soegiono, MSc.
Bendahara II	: Ir. Yosef Hendrata Pribadi, MSc

Tim formatur sendiri sesuai kesepakatan kongres bertugas:

1. Melaporkan seluruh hasil kongres kepada Menteri Perhubungan.
2. Menyempurnakan AD/ART organisasi.
3. Mendaftarkan MTI ke Direktorat Sospol Departemen Dalam Negeri.
4. Menyusun pengurus pelaksana dan program kerja organisasi.
5. Mengadakan rapat pleno pengurus pelaksana dan mengumumkannya di media massa.
6. Menginformasikan hasil kerja Tim Formatur kepada seluruh anggotanya.

Waktu itu struktur kerja MTI baru memiliki delapan divisi, yakni:

1. Bidang Organisasi.
2. Bidang Hubungan Masyarakat.
3. Bidang Pendidikan dan Latihan.
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
5. Bidang Penyelenggaraan Transportasi.
6. Bidang Pendayagunaan Profesi.
7. Bidang Hubungan Luar Negeri.
8. Bidang Sistem Informasi, Dokumentasi dan Publikasi.

Kegiatan-kegiatan

Sejak 1996, MTI sebagai organisasi profesi di bidang transportasi mengadakan berbagai kegiatan dari sarasehan, seminar, workshop dll. Kegiatan yang telah dilakukan MTI misalnya, Sarasehan yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan yang diselenggarakan pada 18 Desember 1996 di Hotel Kemang, Jakarta. Sarasehan ini mengundang 12 panelis yang kemudian hasil dari sarasehan tersebut dibukukan dengan judul *Manajemen Transportasi Perkotaan*.

Pada tahun berikutnya, tepatnya tanggal 28 Januari 1997, MTI kembali mengadakan sarasehan bertajuk 'Partisipasi Masyarakat dalam Perkembangan Peningkatan Keselamatan Jalan di Indonesia' bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. Acaranya sendiri bertempat di Hotel Ambhara, Jakarta dengan mengundang pembicara Ir. Gandhi Harahap, MEng (Direktur Binkot, Ditjen Bina Marga). Sarasehan tersebut merumuskan kesimpulan akan perlunya rumusan yang lebih detail terkait persoalan keselamatan jalan raya (*road safety*) sebagai pertimbangan dalam rumusan kebijakan pembangunan prasarana jalan dan transportasi ke depan di Indonesia.

Pada 10 Juni 1997, MTI bekerja sama dengan Badan Litbang Departemen Perhubungan dan Royal Netherlands Embassy mengadakan seminar setengah hari bertemakan 'Potensi Pengembangan Angkutan Umum Massal Melalui Program Kemitraan.' Seminar diselenggarakan di Ruang Cakra Departemen Perhubungan Jakarta dengan mengundang beberapa pembicara dari Belanda, Ir. B. Westerduin (Dirjen Transportasi Belanda) dan H. Kartman (Netherland Railways).

MTI juga mengadakan pertemuan Urban Transport Forum yang bertempat di Hotel Holiday Inn, Jakarta pada 11 Agustus 1997 dengan topik 'Mencari Format Baru Program Transportasi Perkotaan' dengan pembicara para pakar transportasi nasional.

Di tingkat internal sendiri, MTI secara rutin mengadakan rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian anggota pengurus pusat MTI dengan membahas berbagai program kerja dan isu-isu strategis di bidang transportasi. MTI juga menerbitkan *Warta MTI* sebanyak tiga kali yang berisikan informasi-informasi penting dan aktual bagi seluruh anggota MTI. Juga menerbitkan jurnal MTI

Selain itu, MTI juga mencetak kartu MTI bagi anggotanya yang telah melengkapi persyaratan keanggotaan. MTI pusat juga aktif membantu persiapan pembentukan pengurus Cabang Jawa Barat dan Yogyakarta melalui Surat Keputusan Ketua Umum MTI.

Refleksi satu decade MTI

Sebagai sebuah organisasi profesi di bidang transportasi, MTI ke depan diharapkan tetap memegang mandate yang dulu telah dirumuskan oleh para pendirinya. MTI dibuat bukan dalam konteks operasional, tapi lebih cenderung dalam konteks kebijakan. Menurut Suyono Dikun Ketua Umum MTI 1995 - 2005, MTI ke depan diharapkan lebih menekankan pada *bridging communication* yang independent, netral, professional untuk bisa menjembatani gap antara pemerintah (pembuat keputusan) dengan pelaku ekonomi di bidang transportasi. Harapan tersebut muncul karena selama ini, di negara Indonesia tidak ada korelasi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah di dalam pembangunan transportasi.

Lampiran 1
TIM PENGARAH DAN PELAKSANA
SIMPOSIUM TRANSPORTASI NASIONAL

Tim Pengarah

1. Drs. Muchtarudin Siregar (Dephub)
2. Drs. Subagija S (Dephub)
3. Ir. Ruslan Diwiryono (Dep. PU)
4. Ir. Rahardi Ramelan (Bappenas)
5. Drs. Komarudin MA (BPPT)

Tim Pelaksana:

Ketua umum	: Dr Suyono Dikun (Bappenas)
Ketua I	: Dr Bambang Sugeng (Dephub)
Ketua II	: Dr Sutanto Suhodo (UI)
Sekretaris	: Dr. Bambang SP (BPPT)
Bendahara	: Eddy Prayitno (Sempati Air)
Bidang I	: Ir. Iskandar Abubakar (Dephub)
Bidang II	: Dr Faletahan S (BPPT)
Bidang III	: Dr Indrayani TS (BPPT)
Bidang IV	: Ir. Dedi Darmawan (Dephub)
Bidang V	: Ir. Alvinsyah MSE (UI)
Bidang VI	: Ir Marijanto (Dep PU)

Lampiran 2
PROGRAM KERJA ORGANISASI
MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA

1. Bidang Organisasi
 - a. Pembentukan pengurus daerah.
 - b. Pengumpulan dan pendataan anggota.
 - c. Menyusun kode etik organisasi.
2. Bidang Hubungan Masyarakat
 - a. Menyebarluaskan kegiatan organisasi kepada masyarakat.
 - b. Menjalinkan hubungan kerja sama dengan organisasi profesi lainnya.
3. Bidang Pendidikan dan Latihan
 - a. Menyelenggarakan *short-course*, training atau workshop bagi masyarakat.
 - b. Membantu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang kajian transportasi.
 - c. Mempersiapkan pemberian *fellowship* dalam bidang transportasi.
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Menyelenggarakan konferensi/seminar reguler yang bersifat nasional dan internasional mengenai transportasi.
 - b. Melaksanakan penelitian ilmiah/populer atau pengkajian kebijakan di bidang transportasi.
5. Bidang Penyelenggaraan Transportasi
 - a. Mengadakan *executive gathering* yang merupakan forum komunikasi antara berbagai pihak yang berkecimpung dalam bidang transportasi untuk membahas topik-topik aktual yang perlu dibicarakan bersama.
6. Bidang Pendayagunaan Profesi
 - a. Mempersiapkan pembentukan forum bersama untuk membantu para professional dalam memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan profesinya tersebut.
 - b. Mempersiapkan program akreditasi bagi para professional di bidang transportasi.
7. Bidang Hubungan Luar Negeri
 - a. Menjalinkan kerja sama dengan organisasi profesi transportasi luar negeri.
 - b. Membantu menjalin hubungan kerja sama penelitian antara universitas di Indonesia dengan universitas di luar negeri dalam bidang transportasi.
 - c. Mempersiapkan pertukaran para pakar bidang transportasi antara Indonesia dan negara lain.
8. Bidang Sistem Informasi, dokumentasi dan Publikasi
 - a. Mempersiapkan penerbitan berkala, misalnya: jurnal ilmiah, majalah ilmiah/populer, maupun berita aktual (*newsletter*) di bidang transportasi atau kegiatan organisasi dan aktivitas anggota.
 - b. Menerbitkan direktori anggota organisasi maupun direktori mengenai kontraktor, konsultan, operator di bidang transportasi.
 - c. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi mengenai bidang profesi transportasi, penelitian di bidang transportasi dan bidang-bidang usaha investasi yang terkait dengan transportasi.

Lampiran 3
KODE ETIK
MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA

1. Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi pada kesejahteraan masyarakat.
3. Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia mengutamakan kepentingan umum.
4. Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia memelihara harmonisasi transportasi terhadap lingkungan alam, sosial, dan ekonomi.
5. Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi.
6. Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia secara terus menerus mengembangkan kemampuan profesionalnya.

Lampiran 4
PERSYARATAN ANGGOTA MTI

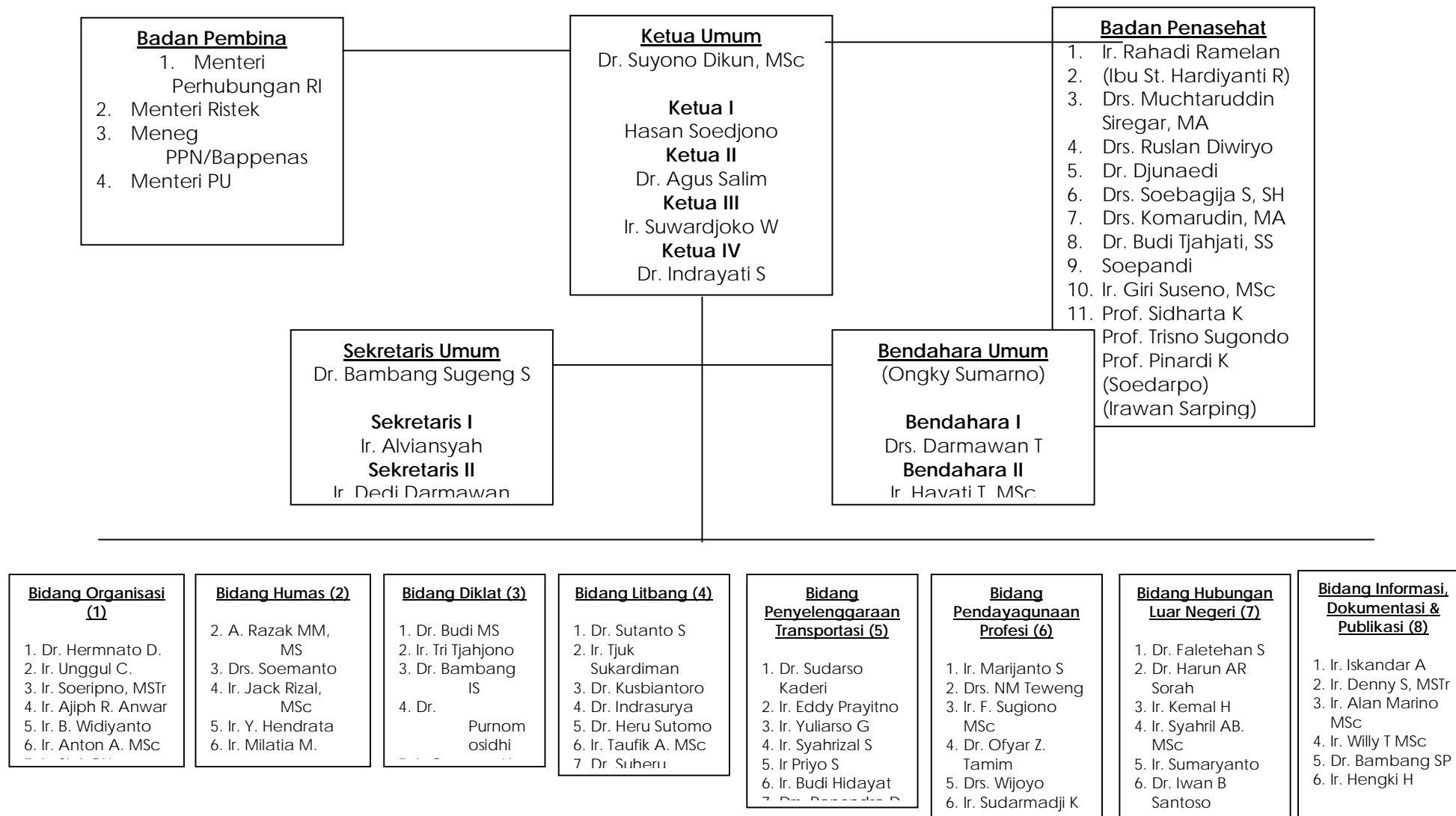
1. Anggota perseorangan
 - a. Persyaratan tersebut cukup dipenuhi salah satu.
 - b. Calon anggota mengisi formulir permohonan tertulis.
 - c. Pada dasarnya pengurus MTI percaya pada isi formulir atau keterangan calon anggota.
 - d. Kartu anggota berlaku maksimal 5 tahun.

	Menurut ART Pasal 1	Tolok ukur
a.	Diakui kepakarannya di bidang transportasi atau,	Curriculum vitae pendidikan formal atau kursus di bidang transportasi.
b.	Memiliki kemampuan professional dalam bidang transportasi atau,	Curriculum vitae pengalaman bekerja di proyek transportasi atau manajemen transportasi.
c.	Telah menerbitkan beberapa buah karya ilmiah di bidang transportasi atau,	Tulisan asli buatan sendiri dan tidak harus telah dipublikasikan.
d.	Berpendidikan formal minimal setingkat diploma-3 (D-3) di bidang transportasi atau,	Copy ijazah pendidikan formal D-3.
e.	Berpendidikan minimal setingkat sarjana di bidang lain dan memiliki kemampuan professional dalam bidang transportasi.	Copy ijazah setingkat sarjana dan curriculum vitae pengalaman bekerja di proyek transportasi atau manajemen transportasi.

2. Anggota perusahaan
 - a. Hanya perusahaan berbadan hukum Indonesia (bukan perusahaan asing).
 - b. Persyaratan di bawah ini adalah paket, harus dipenuhi semuanya.
 - c. Kartu anggota berlaku maksimum 5 tahun.

	Menurut ART Pasal 1	Tolok ukur
a.	Perusahaan berbadan hukum Indonesia,	Pengalaman lisan
b.	Diakui keahlian usahanya di bidang transportasi,	Curriculum vitae bekerja di proyek transportasi atau manajemen transportasi.
c.	Memiliki sumber daya manusia yang professional,	Daftar pegawai dan keahlian di bidang transportasi.
d.	Pelayanannya telah digunakan oleh pengguna jasa.	Daftar produk atau jasa yang dihasilkan dan telah digunakan oleh konsumen.

STRUKTUR ORGANISASI Masyarakat transportasi Indonesia



**Organigram
Masyarakat transportasi Indonesia
Daerah Jawa Barat**

